

# **SILENT CAMPAIGN MELALUI AKSI KAMISAN DALAM KOMUNITAS JARINGAN SOLIDARITAS KORBAN UNTUK KEADILAN (JSKK)**

Ocvita Ardhiani  
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma  
Jl. Margonda Raya No. 100, Depok 16424, Jawa Barat  
ocvitaardhiani@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini membahas tentang silent campaign melalui Aksi Kamisan sebagai bentuk komunikasi dari Komunitas Jaringan Solidaritas Korban Keadilan (JSKK) kepada pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan lainnya. Menggunakan Teori Penyusunan oleh Anthony Giddens dengan metode Studi Kasus dari Robert E. Stake. Paradigma Kritis. Hasil penelitian menemukan bahwa proses penyusunan aksi Kamisan dilakukan oleh anggota kelompok dan peserta dari luar komunitas. Aksi Kamisan menjadi ciri khas komunikasi komunitas JSKK berupa diam atau silent campaign sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Selain itu, JSKK juga menggunakan sistem diskusi internal yaitu Audiensi ke Instansi Pemerintah, melibatkan LBH dan partisipasi masyarakat, sehingga menghasilkan komunikasi protes sosial yang tidak arogan. Asumsi Teori penyusunan tidak sama dalam pelaksanaan proses penyusunan aksi sosial dan tindakan Kamisan JSKK, tindakan adopsi JSKK tidak membatasi kegiatan anggotanya. Kesimpulan dari penelitian adalah Aksi Kamisan sebagai bentuk komunikasi komunitas yang dimiliki oleh JSKK kepada Pemerintah telah dilaksanakan secara utuh namun terdapat peran keputusan politik dalam kebijakan Pemerintah yang kurang tegas dalam mengambil keputusan, sehingga kasus belum tuntas dan kampanye diam Aksi Kamisan sebagai Komunikasi Protes Sosial masih terus dilakukan.*

*Kata kunci: Aksi kamisan, komunikasi kelompok, silent campaign, strategi komunikasi, strategi protes sosial,*

## **ABSTRACT**

*This study discusses the Silent Campaign Through Kamisan Action as a form of communication from the Victims for Justice Solidarity Network Community (JSKK) to the government in resolving cases of past gross human rights violations and others. The theory used is the Theory of drafting by Anthony Giddens. Using the Case Study method from Robert E. Stake. Critical Paradigm. The results of the study found that the process of preparing the Kamisan action was carried out by group members and participants from communities outside the community. The Kamisan action became the hallmark of JSKK community communication in the form of silence or a silent campaign as a form of non-verbal communication. In addition, JSKK also uses an internal discussion system, namely Audiences to Government Institutions, involving Legal Aid Institutions and community participation, resulting in communication of social protests that are not arrogant. Assumptions The theory of drafting is not the same in the implementation of the process of drafting social actions and Kamisan actions of JSKK, the act of adopting JSKK does not limit the activities of its members. The conclusion of the study is that the Kamisan Action as a form of community communication owned by JSKK to the Government has been carried out in its entirety but there is a role for political decisions in Government policies that are less firm in making decisions, so the case has not been completely resolved and the silent campaign of Kamisan Action as a Social Protest Communication is still continue to do.*

*Keywords: Communication Strategy, Group Communication, Kamisan Action, Silent Campaign, Social Protest Strategy*

## PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat dimuka umum sebagai bentuk komunikasi untuk menyuarakan aspirasi yang dilakukan oleh Individu maupun kelompok diperbolehkan sejak Indonesia merdeka dan tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dengan mengindahkan kedamaian dan tidak mengganggu hak orang lain.

Di Indonesia aksi protes sosial ataupun kampanye sebagai upaya mengkomunikasikan pendapat di muka umum dinilai tidak sesuai dengan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Protes sosial adalah bentuk komunikasi untuk mengungkapkan biasanya berupa keluhan yang dilakukan individu dan atau kelompok dalam masyarakat kepada pemerintah karena terjadinya krisis sosial, baik secara politik, budaya, maupun ekonomi. Protes sosial juga dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi menyampaikan pendapat yang dilakukan beramai-ramai mengeluarkan deklarasi yang menolak gagasan di muka umum berupa pembangkangan, keluhan, keberatan, boikot, pemogokan atau keengganan melakukan sesuatu terhadap kekuasaan (Lofland, 2003 dalam Widia & Widowati, 2015).

Kerusuhan besar yang terjadi akibat aksi kampanye protes sosial sebagai upaya komunikasi, tercatat dalam sejarah dimulai

sejak tahun 1965 bentrok antara mahasiswa dengan aparat hingga tahun pemilu 2019 dikenal dengan aksi 21-22 Mei (Raditya & Sholih, 2019). Terjadinya kerusuhan tersebut mengakibatkan banyaknya tragedi pelanggaran HAM dalam kategori berat. Pelanggaran tersebut antara lain Tragedi Penembakan di Tanjung Priok, Tragedi Kekerasan di Talangsari, Tragedi Penembakan Trisakti dan Semanggi, Pembunuhan Munir sebagai tokoh yang mencoba menyuarakan keadilan. Pelanggaran HAM tidak berhenti di tahun 2004, di tahun 2011 hingga 2013 pelanggaran HAM masih berlanjut terdapat 112 hingga 709 kasus dugaan pelanggaran HAM, hingga tahun 2021 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat terdapat 3.758 aduan kasus dugaan pelanggaran HAM (Yla & Bmw, 2021).

Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi akibat Kerusuhan yang ditimbulkan dari aksi protes sosial, sehingga terdapat salah satu komunitas yang dibentuk dari para korban ataupun keluarga korban pelanggaran HAM yang berkumpul menjadi suatu komunitas yaitu Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) yang bertujuan untuk melakukan kampanye atau aksi protes sebagai bentuk komunikasi kelompok dalam hal memperjuangkan penegakan keadilan pelanggaran HAM berat pada masa lalu ataupun masa sekarang dan melawan impunitas di Indonesia dengan cara yang berbeda dan dinilai tidak melanggar UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di

Muka Umum yaitu dengan cara diam atau *silent campaign* dalam aksi sosial.

*Silent Campaign* merupakan salah satu bentuk aksi protes sosial secara diam sebagai upaya terorganisir para peserta aksi dengan cara diam untuk menunjukkan ketidaksetujuan dan bentuk pembangkangan sipil serta perlawanan tanpa kekerasan. Studi mengenai *Silent campaign* atau *silent protest* telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kristiyono dkk (2020) mengenai Kontra-hegemoni komunitas seni Biennale Jawa Timur terhadap dominasi reproduksi konten hoax, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hegemoni baru khusus para seniman digital di Biennale Jawa Timur yang disebut Kontra Hegemoni Digital sebagai *silent campaign*. Melalui karya berformat digital, para seniman berusaha mengkomunikasikan karya seninya sebagai bentuk perlawanan diam, protes, dan kritik terhadap hegemoni yang terjadi di masyarakat.

*Silent Campaign* atau Aksi Protes sosial memiliki beberapa jenis menurut Locher 2002 (Sukmana, 2016) yaitu *crowd* (kerumunan), *riot* (kerusuhan) dan *rebel* (penolakan, pembangkangan), sehingga menuntut kelompok maupun organisasi untuk memiliki strategi khusus dalam berkomunikasi melakukan aksi protes sosial. Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima (komunikan), sampai pada

pengaruh atau efek (*feedback*) yang dirancang atau dibuat untuk mencapai tujuan yang baik (Cangara, 2014).

Pentingnya strategi protes sosial dalam komunikasi kelompok sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Kurniawan (2021) mengenai Strategi Komunikasi Aksi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Menuntut Tindakan Represif Aparat Kepolisian, hasil menunjukkan Strategi komunikasi dalam gerakan aksi protes sosial merupakan hal penting, karena sebuah aksi demonstrasi yang bergerak dengan cara dadakan dan spontanitas tanpa adanya perencanaan komunikasi yang matang, maka hasilnya tidak akan maksimal dan poin yang menjadi tuntutan belum tentu tersampaikan dengan baik, bahkan hal yang paling ditakutkan yaitu aksi tersebut akan berujung pada tindakan anarkis yang akan merugikan Bangsa dan Negara.

Studi lain yang dilakukan oleh Pranata dkk (2021) mengenai pentingnya strategi komunikasi dalam protes sosial menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan masyarakat dengan yang melakukan protes sosial kepada stakeholder lain mayoritas secara dialogis sebagai bentuk advokasi. Peristiwa komunikasi yang dianalisis menunjukkan masyarakat mampu mencapai kepentingannya, namun diperlukan upaya besar dan pengerahan seluruh kekuatan kolektif masyarakat. studi lain mengenai strategi komunikasi gerakan dan protes sosial menunjukkan berbagai cara untuk

mengkomunikasikan tujuan informasi dari kelompok, organisasi maupun masyarakat yaitu memilih komunikator dari kalangan *volunteer* atau partisipan di luar kelompok, menggunakan berbagai media massa dan online (Widorini, 2014), ataupun diskusi kelompok dengan pihak penguasa (Widiyanti, 2007).

Penelitian ini akan menganalisis dan mendeskripsikan *Silent Campaign* melalui aksi Kamisan sebagai strategi protes sosial dalam komunikasi komunitas Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK) untuk menyuarakan dan memperjuangkan keadilan penegakkan HAM. Strategi akan dianalisa menggunakan konsep dari Pace, Peterson & Dallas (Miftah, 2022) tentang tiga tujuan utama Strategi komunikasi dari komunitas JSKK meliputi (a) *to secure understanding*, (b) *to establish acceptance*, (c) *to motivate action*. Penelitian ini juga menganalisa *silent campaign* aksi kamisan sebagai praktik strategi protes sosial (Rustan & Hakki, 2017) dimulai dari Mengidentifikasi Visi dan Misi, Menentukan Program dan Kegiatan, Menentukan Tujuan dan Hasil, Seleksi Audiensi yang menjadi Sasaran, Mengembangkan Pesan, Identifikasi Pembawa Pesan (Tampilan Komunikator) Mekanisme Komunikasi Media, serta Scan Konteks dan Persaingan.

Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Teori penyusunan, gagasan dari sosiolog Anthony Giddens dan pengikutnya. Teori ini merupakan sebuah

teori dasar dari aksi sosial yang menyebutkan bahwa tindakan manusia adalah sebuah proses produksi dan reproduksi dalam berbagai macam sistem sosial. Asumsi dari teori penyusunan yang dibuat oleh Anthony Giddens yaitu: *pertama*, tindakan manusia adalah sebuah proses produksi dan reproduksi dalam berbagai macam sistem sosial (sistem sosial berupa sruktur seperti ekspetasi hubungan, peran kelompok, dan lembaga kemasyarakatan). *Kedua*, penyusunan selalu melibatkan interpretasi, moralitas, dan kekuatan. *Ketiga*, Tindakan mengadopsi untuk mencapai kebutuhan kelompokakan menciptakan kendala yang membatasi tindakan anggota dari suatu kelompok. Salah satu kontribusi yang paling menarik dari teori penyusunan adalah dalam prosesnya yang diikuti oleh kelompok seperti membuat keputusan (Littlejohn & Foss, 2011).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, fokus pada interaksi anggota kelompok yang menghasilkan suatu cara atau strategi protes sosial dalam mengkomunikasikan permasalahan komunitas mengenai pelanggaran HAM di Indonesia yang hampir dilupakan oleh pemerintah maupun masyarakat lainnya. Penelitian ini menggunakan paradigma Kritis yaitu paradigma yang memberikan kritik, transformasi sosial, proses emansipasi dan penguatan sosial (Zamroni, 2022). Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah

komunitas Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Informan Utama dalam penelitian adalah Ibu Sumarsih sebagai pemrakarsa atau salah satu penggagas berdirinya komunitas dan salah satu Presidium JSKK serta ibu dari dari korban pelanggaran HAM Semanggi I yaitu Wawan mahasiswa Universitas Atma Jaya. Informan utama lainnya yaitu Ibu Suciwati, pemrakarsa atau salah satu penggagas dan sebagai Koordinator Presidium dalam komunitas serta istri dari korban pelanggaran HAM berat yaitu Munir Said Thalib Al-Kathiri. Informan ketiga adalah Tioria, Staf Divisi Pemantauan Impunitas dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai lembaga yang bekerjasama dengan JSKK dalam aksi kamisan Informan keempat dalam penelitian ini adalah Monica sebagai Mahasiswi dari Universitas Toronto di Kanada jurusan Hukum, sedang magang di KontraS.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Strategi Protes Sosial pada Komunikasi Komunitas Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) di kawasan Monas, Jakarta Pusat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan mewawancarai lembaga independen Komnas HAM yaitu Andi Azis, staf bidang Pengembangan dan Penyelidikan Komite Nasional Hak Asasi Manusia

(Komnas HAM).

Peneilitian studi kasus adalah penelitian sebuah fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, tanpa ada intervensi apapun dari peneliti dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif. Karakteristik penelitian studi kasus yaitu menggali substansi mendasar dibalik fakta yang terjadi, studi kasus bekerja pada suatu kasus secara mendalam, u mumnya digunakan untuk menguji sebuah teori (Wahyuningsih, 2013).

Studi kasus yang dipilih dalam penelitian ini sesuai dengan konsep studi kasus Robert E. Stake (Putra, 2020) yaitu studi kasus Instrumental, maksudnya adalah dari kasus yang diteliti dalam penelitian ini untuk menunjukkan adanya sesuatu yang dapat dipelajari dari kasus tersebut atau dapat dikatakan bahwa kasus dalam penelitian ini dicermati secara mendalam, konteksnya dikaji secara menyeluruh, dan aktivitas kesehariannya diperinci untuk mengungkap motif-motif eksternal dari suatu kasus.

Lokasi penelitian hanya dilakukan pada komunitas JSKK, hal ini sesuai dengan kasus yang telah peneliti tetapkan. Sementara waktu dibatasi hanya satu bulan lebih seminggu, terhitung sejak Mei hingga awal Juli, karena pada pertengahan bulan Juli terdapat tanggal merah dan hari raya Idul Fitri sehingga komunitas JSKK tidak melakukan perkumpulan dan aksi sosial.

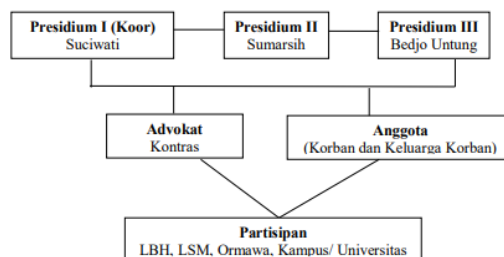
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar belakang Komunitas Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK)

JSKK merupakan sebuah paguyuban yang berdiri sejak 9 Agustus 2005. individu yang tergabung dalam paguyuban ini adalah para korban pelanggaran HAM dan juga para keluarga korban peristiwa-peristiwa lainnya yang terampas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Awal berdirinya komunitas JSKK yaitu dalam sebuah acara “Yap Thiam Hien Award” pada 10 Desember 2004, Romo I Sandyawan Sumardi SJ menyinggung tentang akan berdirinya sebuah organisasi korban/keluarga korban bernama “Swabela”, organisasi ini merupakan sebuah sarana kumpul-kumpul bagi para korban/ keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) untuk berbuat sesuatu guna mendukung perjuangannya dalam menuntut kebenaran dan keadilan serta melawan lupa. Akan tetapi nama tersebut itu kurang diminati, karena merasa alergi dengan kata “swa” yang pernah dipakai oleh sebuah organisasi yang kala itu

kurang mendapat simpati publik, yakni Pamswakarsa.

Sejak awal berdirinya komunitas JSKK hingga sekarang, komunitas ini tidak mempunyai struktur yang jelas dan pasti serta mengikat akibat kurangnya biaya untuk membayar orang lain membuat manajemen dalam komunitas JSKK, yang dipikirkan adalah cara untuk bertahan baik di dalam komunitas menjalin kebersamaan atau solidaritas sesama anggota dan di luar komunitas yaitu mengkomunikasikan niat dan tujuan komunitas ini melalui aksi yang dilakukan kepada khalayak ramai terutama pemerintah agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang mereka tuntut segera ditindaklanjuti, sebagai sebuah paguyuban yang berlandaskan demokrasi, dan menjunjung tinggi prinsip egaliter. Namun seiring dengan berjalannya penyelesaian kasus dan banyaknya anggota yang bergabung sehingga Komunitas JSKK telah membentuk pengurus dalam komunitas yang memiliki peran masing-masing, Gambar 1 adalah alur peran pengurus komunitas.



Gambar 1. Alur Peran Pengurus Komunitas JSKK  
Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Wawancara 2015

Seiring dengan dinamika perjuangan, komunitas ini berganti nama menjadi “Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan” dengan kependekan yang sama yaitu “JSKK”. Komunitas JSKK awalnya melakukan kegiatan seperti kegiatan sharing, sarasehan, dan diskusi seputar tuntutan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, pemahaman masyarakat terhadap makna HAM dan penerapannya. Sejak awal berdiri, JSKK tidak hanya sendiri melakukan kegiatan penuntutan kasus pelanggaran HAM, akan tetapi JSKK berkerjasama dengan lembaga penegak HAM lainnya seperti KontraS sebagai lembaga advokasi untuk menjalani audiensi kepada setiap lembaga pemerintah yang melayani penuntasan kasus HAM di Indonesia seperti Komnas HAM, Dirjen HAM, dan Jaksa Agung.

### ***Silent Campaign* melalui Aksi Kamisan sebagai Strategi Komunikasi Protes Sosial Komunitas JSKK**

Berbagai cara aksi protes dan kampanye sosial telah dilakukan untuk menegakkan keadilan pelanggaran HAM mulai dari demonstrasi atau unjuk rasa seperti pada umumnya dengan berteriak-teriak menuntut keadilan baik di depan istana presiden, depan gedung DPR/MPR, di depan gedung Kejaksaan Agung, hingga di bundaran HI serta membagikan selebaran brosur tentang kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Dari semua kegiatan tersebut tidak menghasilkan respon baik dari

pemerintah, bahkan seakan pemerintah pura-pura tidak mengetahui dengan semua hal tersebut. Sehingga, semenjak dibentuk secara khusus komunitas JSKK bekerjasama dengan lembaga Advokasi untuk memroses hukum di Indonesia terkait HAM.

Seorang keluarga korban Semanggi I ibu dari D.R Norma Irmawan (Wawan) yang menjadi korban penembakan pada masa Orde Baru, memiliki sebuah idea tau gagasan yaitu kegiatan yang mengkrystal pada sebuah sikap, yakni terus berjuang mengungkap kebenaran, mencari keadilan, dan melawan lupa. Sehingga, dipenghujung tahun 2006, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), yaitu sebuah paguyuban korban/keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mengadakan sharing bersama JRK (Jaringan Relawan Kemanusiaan) dan KontraS untuk mencari alternatif kegiatan dalam perjuangannya dan menyepakati untuk mengadakan suatu kegiatan berupa *silent campaign* atau “Aksi Diam”. Disepakati pula mengenai hari, tempat, waktu, pakaian, warna dan mascot sebagai simbol gerakan. Aksi atau kampanye dilakukan pada hari Kamis pukul 16.00-17.00 WIB, penetapan hari tersebut menjadi awal dinamakan kampanye tersebut yaitu ”Aksi Kamisan”. *Silent campaign* melalui aksi kamisan dilakukan dengan cara berdiri di depan Istana Presiden, Jakarta, tidak melakukan komunikasi verbal seperti orasi dengan berteriak-teriak menyampaikan tuntutan, komunikasi yang dilakukan menggunakan nonverbal untuk

menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dengan menggunakan alat sebagai simbol yang mewakili aspirasi tuntutan dari komunitas JSKK, hal ini juga merujuk pada visi dan misi komunitas yaitu untuk melawan impunitas.

Aksi kamisan terinspirasi dari sebuah gerakan di Amerika Latin yang dikenal dengan nama *Mothers of the Plaza de Mayo*, yaitu sebuah organisasi para ibu di Argentina yang berjuang menuntut tanggung jawab Negara untuk mengembalikan anak-anaknya yang hilang secara paksa, melakukan demonstrasi setiap Kamis di depan Plaza de Mayo (Kontras, 2006). Aksi tersebut juga berupa *silent campaign*. Aksi Kamisan atau yang dikenal juga dengan sebutan “Aksi Payung Hitam” merupakan bentuk *silent campaign* yang berupaya untuk bertahan dalam memperjuangkan, mengungkap kebenaran, mencari keadilan, dan melawan lupa. Berlangsung setiap hari Kamis pada sore hari atas beberapa pertimbangan bahwa agenda kegiatan dari kebanyakan para peserta pertemuan kala itu tiap hari Kamis ternyata kosong, dan berlangsung sore hari, agar tidak terlalu mengganggu aktivitas peserta aksi, di samping pertimbangan bahwa pada jam pulang kantor pengguna jalan cukup banyak, sehingga diharapkan banyak pihak yang menyaksikan aksi.

Aksi kamisan tidak hanya berdiri di depan Istana Presiden dengan tangan kosong, *silent campaign* yang dilakukan dengan membawa dan menggunakan beberapa

perlengkapan yaitu: Payung berwarna hitam, Foto-foto korban pelanggaran HAM, Berbagai spanduk bertuliskan kritik dan tuntutan, Selebaran, Surat kepada Presiden, Bunga mawar, Bunga tabur dan *standing*, *Standing banner*, dan lain sebagainya. Alat tersebut sebagai komunikasi non verbal komunitas JSKK dan Semua alat-alat tidak dipakai secara bersamaan, hanya digunakan dalam beberapa momen acara yang tepat, misalnya dalam acara Mei Menggugat diadakan teatrikal puisi oleh beberapa Mahasiswa, pada acara hari HAM sedunia menggunakan spanduk, bunga mawar, bunga tabur dan kaos pertunjukkan.

Pada aksi rutin setiap minggunya alat yang digunakan secara konsisten yaitu Payung, Spanduk, foto-foto korban, surat kepada Presiden dan bunga mawar. Dalam perkembangannya, *silent campaign* melalui aksi kamisan ini juga dikenal dengan Aksi damai dan mendapat dukungan serta simpati dari berbagai komunitas korban pelanggaran HAM, bahkan tidak sedikit para mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi turut dalam aksi kamisan. Respon baik juga muncul dari masyarakat luas, baik yang aktif dalam institusi-institusi seperti berbagai LBH dan organisasi atau komunitas lainnya yang bergerak di bidang HAM maupun perorangan yang concern terhadap penegakan HAM di Indonesia, selain itu setiap minggunya selalu kedatangan sekurangnya satu wartawan dari berbagai media untuk meliput kegiatan JSKK berupa Aksi Kamisan.



## **Tujuan Strategi Protes Sosial sebagai Komunikasi Kelompok JSKK**

Strategi komunikasi sangat dibutuhkan bagi setiap komunitas ataupun organisasi sebagai langkah yang ditempuh dalam mencapai tujuan atau visi dan misi. Dari hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti di lapangan, tujuan strategi komunikasi yang terdapat di dalam komunitas Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK) yaitu:

*Pertama*, Mengamankan pengertian (*to secure understanding*), JSKK melakukan kegiatan untuk memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan kepada sesama anggota ataupun orang lain dapat dimengerti dengan baik isi pesan yang disampaikan seputar perkembangan penyelesaian kasus HAM dengan cara memberitahu (*announcing*). Strategi protes sosial pada komunikasi komunitas JSKK dilakukan dengan cara komunikasi interpersonal oleh presidium JSKK kepada lembaga advokasi yaitu Kontras, kemudian kepada anggota lain dalam JSKK bisa dilakukan komunikasi secara tatap muka langsung dengan cara berdiskusi langsung dalam rapat atau dalam kegiatan refleksi pada aksi kamisan, ataupun melalui telepon baik secara lisan maupun tulisan (SMS) terkait perkembangan hasil kegiatan dari upaya penuntutan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sedangkan tujuan strategi protes sosial pada komunikasi komunitas yang dilakukan JSKK kepada publik dan pemerintahan yaitu dengan cara aksi kamisan, mengirimkan surat ke Presiden dan

audiensi ke lembaga terkait seperti Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pesan juga disebarluaskan melalui media sosial yaitu website, media sosial dan twitter.

*Kedua*, Menciptakan penerimaan (*to establish acceptance*). Tujuan strategi komunikasi yang kedua yaitu menciptakan penerimaan baik penerimaan isi pesan yang disampaikan maupun penerimaan keberadaan orang baru di lingkungan sekitar. Penerimaan pesan kepada sesama anggota JSKK dilakukan secara terus menerus. Sedangkan menciptakan penerimaan bagi orang lain yang ingin bergabung dengan komunitas dilakukan dengan terbuka yaitu dengan pemilihan media yang dianggap efektif untuk menyebarkan pesan kepada publik sehingga penerimaan keberadaan orang lain lebih mudah dan terbuka.

*Ketiga*, Memotivasi Perbuatan (*To Motivate Action*). Perbuatan untuk memotivasi yang terdapat dalam JSKK adalah dengan cara diadakannya refleksi yang terdapat di dalam rangkaian acara pada aksi kamisan. Refleksi dilakukan dengan tujuan memotivasi, menarik emosional orang lain agar dapat merasakan sebagai korban ataupun keluarga korban yang menuntut keadilan pemerintah dari perbuatan yang melanggar aturan atau merapasi Hak Asasi dan membujuk orang-orang yang mengikuti acara kamisan, baik individu, komunitas JSKK, lembaga advokasi Kontras, LBH, PWI dan organisasi lainnya yang tergabung dalam aksi kamisan.

## **Strategi Aksi Kamisan dan Teori Penyusunan**

Proses penyusunan strategi komunikasi yang dilakukan oleh komunitas JSKK melalui aksi kamisan, tidak jauh berbeda dengan asumsi teori penyusunan dari Anthony Giddens. Proses pembentukan strategi komunikasi JSKK berupa *silent campaign* melalui aksi kamisan jika dikaitkan dengan *asumsi teori yang pertama* yaitu tindakan manusia adalah sebuah proses produksi dan reproduksi dalam berbagai macam sistem sosial (sistem sosial berupa struktur seperti ekspektasi hubungan, peran kelompok, dan lembaga kemasyarakatan).

Dihubungkan dengan komunitas JSKK, tindakan dari anggota kelompok JSKK merupakan proses produksi struktur berupa ekspektasi hubungan sesama anggota JSKK yang dihasilkan dari komunikasi antarpribadi guna menyatukan rasa solidaritas kemudian melihat hubungan antara komunitas JSKK harus dalam keadaan baik sebagai cara untuk mencapai tujuan komunitas menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang menjadi kewajiban lembaga Pemerintah seperti Menkopolkum, Kejaksaan Agung, DPR, dan Presiden. Kemudian melihat peran kelompok JSKK di lingkungan masyarakat yang berperan sebagai komunitas non government yang bertujuan menyuarakan keadilan penegakan HAM di Indonesia.

*Pada asumsi kedua* dalam teori yaitu penyusunan selalu melibatkan interpretasi, moralitas, dan kekuatan. Penyusunan strategi

komunikasi komunitas JSKK berupa *silent campaign* melalui aksi kamisan melibatkan interpretasi dari masing-masing individu anggota kelompok JSKK dalam perkembangan kasus yang ada mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, interpretasi tersebut dilakukan agar setiap anggota kelompok paham dan mempunyai ide ataupun solusi sehingga menghasilkan strategi yang baik.

Komunitas JSKK sangat menjunjung tinggi moralitas baik di dalam komunitas maupun moralitas antara komunitas JSKK, LBH yang berkerjasama mencapai tujuan, masyarakat maupun dengan lembaga pemerintah, sehingga strategi yang dibuat seperti Aksi Kamisan dilakukan dengan baik seperti menggunakan tempat yang efektif dan tidak merugikan orang lain, tidak memblokir jalan raya karena menghormati hak masyarakat menggunakan jalan raya, tidak anarkis sehingga tetap tercipta keamanan dan tidak menyulitkan Polisi sekitar, mengirim surat kepada Presiden dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan selalu meminta pendampingan Polisi saat menyerahkan surat.

Komunitas JSKK juga melihat dari sudut pandang kekuatan dalam mencapai visi dan misi komunitas tersebut. Komunitas JSKK menyadari bahwa jika dalam mencapai visi dan misi dalam menyuarakan keadilan HAM komunitas tersebut bergerak sendiri tidak akan mungkin dapat didengarkan suaranya oleh Pemerintah sehingga dari hal

tersebut komunitas JSKK membuat strategi komunikasi dengan meminta bantuan kepada beberapa Lembaga Bantuan Hukum dan mengangkat topik kepada masyarakat baik individu maupun organisasi mahasiswa melalui media massa.

Teori penyusunan memiliki *asumsi ketiga* yaitu tindakan mengadopsi untuk mencapai kebutuhan kelompok, menciptakan kendala yang membatasi tindakan anggota dari suatu kelompok. Akan tetapi, pada asumsi tersebut dalam komunitas JSKK tidak terjadi seperti itu, dalam penyusunan strategi komunikasi, JSKK memang mengadopsi *silent campaign* melalui Aksi Kamisan dari sebuah gerakan di Amerika Latin yang dikenal dengan nama *Mothers of the Plaza de Mayo*, yaitu sebuah organisasi para ibu di Argentina yang berjuang menuntut tanggung jawab Negara untuk mengembalikan anak-anaknya yang hilang secara paksa. Walaupun komunitas JSKK mengadopsi tindakan tersebut akan tetapi tidak membatasi tindakan anggota komunitas.

Masing-masing anggota tetap dibebaskan dalam melakukan tindakan apapun dengan menggunakan moralitas yang baik, seperti misalnya setiap anggota komunitas bebas melakukan tindakan mencari perkembangan berita seputar HAM berat masa lalu, bebas melakukan usulan ide baru terkait strategi komunikasi untuk mencapai tujuan kelompok. Dari semua asumsi yang terdapat pada teori Penyusunan dari Anthony Giddens, tidak sama seperti *silent campaign*

yang dibuat oleh komunitas JSKK sebagai strategi komunikasi dari Aksi Kamisan, maksudnya adalah pada asumsi pertama dan kedua komunitas JSKK masih tetap memiliki ataupun melakukan serangkaian konsep dan pemikiran tersebut dalam melakukan penyusunan strategi untuk mencapai Visi dan Misi kelompok, pada asumsi ketiga tindakan dalam komunitas JSKK tidak sama seperti pemikiran Anthony Giddens. Pada kenyataannya setiap anggota JSKK masih dapat melakukan berbagai tindakan dan mengeluarkan ide kepada Presidium, anggota JSKK lainnya, masyarakat ataupun Pemerintah mengenai perkembangan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu, yang terpenting tetap memiliki moralitas yang baik.

## SIMPULAN DAN SARAN

Pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi dan proses Penyusunan yang dilakukan oleh komunitas JSKK dengan cara diskusi dengan anggota JSKK dan Lembaga Bantuan Hukum seperti KontraS, JRK, dan PWI. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Strategi komunikasi yang dipilih melalui jalur interpersonal, kelompok dan media massa untuk mencapai tujuan komunitas. Proses penyusunan yang dilakukan komunitas JSKK dikaitkan dengan teori penyusunan didapatkan bahwa tidak semua asumsi yang berarti dari tiga asumsi teori hanya dua asumsi yang sesuai dengan strategi komunikasi penyusunan dalam komunitas

yaitu asumsi pertama tindakan manusia dalam produksi dan reproduksi terjadi untuk membentuk solidaritas. Asumsi kedua yaitu komunitas JSKK memikirkan mengenai interpretatif, moralitas, dan kekuatan untuk dapat menghasilkan strategi komunikasi yang tepat, dan pada asumsi yang ketiga tindakan dalam komunitas JSKK tidak sama seperti pemikiran Anthony Giddens, komunitas JSKK melakukan adopsi untuk membuat strategi komunikasi kelompok. Sehingga dapat dikatakan bahwa seiring berkembangnya zaman, teori penyusunan dari Anthony Giddens mengalami perubahan dari asumsi teori tersebut dalam implementasi aksi sosial demonstrasi.

Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian ini masih dapat diperluas dan dikaji dalam bidang lain misalnya dengan mencari informasi lain dari strategi lembaga Pemerintah terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ataupun kasus HAM saat ini..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, Hafied. 2014. "Perencanaan dan Strategi Komunikasi". PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Damayanti, Risma. (2022). Kebebasan Berpendapat Dilindungi UUD 1945, ini Landasan Hukumnya. Diakses pada 13 Mei 2022, Link: <https://nasional.tempo.co/read/1580792/kebebasan-berpendapat-dilindungi-uud-1945-ini-landasan-hukumnya>
- Kontras. 2006. "Kertas Posisi Kontra Kasus Talangsari 1989 Sebuah Kisah Tragis Yang Dilupakan". Diakses pada 6 Desember 2021
- Kristiyono, Jokhanan dkk. (2020). Counter-hegemony of the East Java Biennale art community against the domination of hoax content reproduction. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 33, Issue 1, 2020, page 26-35
- Kurniawan, Ahmad. (2021). Strategi Komunikasi Aksi Mahasiswa Menuntut Tindakan Represif Aparat Kepolisian (Studi Kasus Aksi Mahasiswa Uin Raden Fatah Palembang 3 Oktober 2019 Di Depan Mapolda Sumsel). *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Palembang: UIN Raden Fatah
- Littlejohn, Stephen W., & Karen A. Foss. (2011). Teori Komunikasi: Theories Of Human Communication. Edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika
- Miftah, Mohamad. (2022). Pengembangan Model E-Learning: Studi Analisis Kebutuhan & Uji Kelayakan. Bandung: CV. Feniks Muda Sejahtera
- Pranata, Rici T.H., dkk. (2021). Strategi Komunikasi dalam Gerakan Penolakan Isu Relokasi dan Penutupan Pulau Komodo. *Jurnal Komunikasi Pembangunan* Vol. 19 (02) 2021 | 111-123  
<https://doi.org/10.46937/19202137066>
- Putra, Anom Surya. (2020). Ponggok, Inspirasi Kemandirian Desa:

- Menjelajahi Badan Hukum BUM Desa. Yogyakarta: LkiS
- Raditya, Iswara N & Mufti Sholih. (2019). Sejarah Kerusuhan di Jakarta: dari 1965 Hingga 2019. Tirto.id Diakses pada 3 Januari 2022, Link: <https://tirto.id/sejarah-kerusuhan-di-jakarta-dari-1965-hingga-2019-dW8j>
- Rustan Ahmad Sultra & Nurhakki Hakki. (2017). Pengantar Ilmu Komunikasi. Yogyakarta: Deepublish
- Sukmana, Oman. (2016). Konsep Dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing
- Widia, Risda Nur & Widowati. (2015). Protes Sosial Dalam Kumpulan Cerita Pendek Mati Baik-Baik, Kawan Karya Martin Aleida: Pendekatan Sosiologi Sastra. *Jurnal Caraka* Volume 2, Nomor 1, Edisi Desember 2015
- Widorini, Wahyu Yuliasuti. (2014). Strategi Komunikasi Earth Hour Dalam Kampanye Gaya Hidup Ramah Lingkungan (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Strategi Komunikasi Earth Hour Dalam Kampanye Gaya Hidup Ramah Lingkungan Di Kota Solo Tahun 2013). *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Wahyuningsih, Sri. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, Dan Contoh Penelitiannya. Madura: UTM Press
- Widiyanti, Emi. (2007). Pola Komunikasi Petani Dalam Rangka Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Di Desa Ngabeyan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri. *Jurnal M'POWER* Vol. 5 No.5 Maret 2007
- Yla & Bmw. (2021). Komnas Terima 3.758 Aduan Pelanggaran HAM, Terbanyak di DKI. Diakses pada 21 November 2021, Link: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004151630-20-703156/komnas-terima-3758-aduan-pelanggaran-ham-terbanyak-di-dki>
- Zamroni, Mohammad. (2022). Relasi Kuasa Media Politik: Kontestasi Politik dalam Redaksi Berita Televisi. Jakarta: Kencana